



Disita Uang Pecahan Dolar

■ Haryadi Suyuti Ditangkap KPK

Kami mengamankan sejumlah uang, dokumen, dan beberapa orang. Sementara jumlah uang dalam dolar masih kami hitung.

Nurul Ghufron
Wakil Ketua KPK

YOGYA. TRIBUN - Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Yogyakarta, Kamis (2/6). Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dihubungi *Tribun Jogja*, membenarkan penangkapan tersebut.

Ali menjelaskan, penangkapan itu berdasarkan dugaan kasus tindak pidana penyuapan yang dilakukan oleh sejumlah pejabat di

• kehalaman 11



GRAFIS/FALUZZA RAKHMAN

TANGKAP TANGAN

- Haryadi Suyuti bersama beberapa orang lain ditangkap
- KPK terkait persoalan suap.
- KPK belum meminci kasus apa yang melatarbelakangi OTT kali ini.
- Terdapat beberapa orang yang diamankan, dua di antaranya adalah kepala dinas.
- Haryadi Suyuti sendiri baru 12 hari lalu resmi melewatkan jabatannya sebagai Wali Kota Yogyakarta.
- KPK meminta publik menunggu kerja tim penyidikinya.
- Hasilnya akan disampaikan segera.
- Sebelum menjadi pejabat publik, Haryadi sempat menjadi karir profesional di sejumlah perusahaan.
- Selain dua periode menjabat Wali Kota Yogyakarta.
- Haryadi sempat satu periode menjabat sebagai wakil wali kota (2006-2011).

Tiket

Disita Uang Pecahan

• Sambungan Hal 1

Pemkot Yogyakarta, termasuk Haryadi Suyuti.

"Benar, hari ini Kamis (2/6) KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap di Yogyakarta," jelas Ali melalui pesan Whatsapp. "Salah satu yang diamankan adalah Wali Kota Yogyakarta (periode 2017-2022)," imbuhnya.

Ali Fikri menjelaskan, KPK bergerak cepat untuk segera mengagendakan pemeriksaan terhadap para pejabat yang kemarin tadi terjaring-tangkap tangan. "Tim segera melakukan permintaan keterangan terhadap para pihak dimaksud. Segera setelahnya akan kami sampaikan perkembangannya," ujar Ali Fikri. Ditanya perkara yang menjerat Wali Kota Yogyakarta periode 2011-2016 dan 2017-2022 ini, Ali belum dapat menjelaskan secara rinci. Penangkapan pun terjadi di Jakarta, tapi belum diketahui identitasnya.

KPK pun menyita sejumlah uang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini. Uang dalam pecahan dolar itu masih dihitung. "Kami mengamankan sejumlah uang, dokumen, dan beberapa orang. Sementara jumlah uang dalam dolar masih kami hitung," jelas Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dikutip dari *Detik.com*.

Dia belum merinci siapa saja yang ditangkap selain Haryadi. Dia hanya menyebutkan perkara yang melatar OTT ini terkait perzinan. "Terkait perzinan," urai Ghufron. Dari informasi yang beredar di kalangan pewarta, terdapat enam

orang lain yang diamankan dalam penangkapan ini. Dua di antaranya adalah kepala dinas di lingkup pemkot.

Sementara itu, Ketua KPK, Firlil Bahuri, menyatakan belum dapat menyampaikan kasus apa yang menjerat Haryadi Suyuti. Ia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu kerja tim penyidik KPK. "Sampai saat ini rekan-rekan kami masih bekerja, dan tolong diberikan waktu untuk menuntaskannya," ujar Firlil. "Pada saatnya nanti KPK akan menyampaikan ke publik dan rekan-rekan media," ucap dia.

Segel ruangan

KPK menyegel ruang kerja wali kota. Untuk diketahui, masa jabatan Haryadi Suyuti sebagai wali kota telah selesai dua pekan lalu. Penjabat (PJ) Wali Kota Yogyakarta, Sumadi membenarkan perihal kedatangan petugas KPK tersebut. Nemun, dia tidak melihat langsung aktivitas mereka selama di Balai Kota lantaran ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Hanya saja, ia memastikan bahwa itu benar petugas KPK.

"Tadi (kemarin) siang saya setelah rapat dari Pemda DIY di Kepatihan, saya ke Balai Kota. Setelah itu, pas saya mau mulai kegiatan, jam 13.00, kemudian ada petugas KPK," jelasnya. "Ada tiga orang, menunjukkan identitas, saya lihat itu benar. Terus, mohon izin untuk melakukan penyegelan ruang wali kota. Setelah itu, saya kooperatif, ya, *monggo*, silakan saja. Terus kemudian saya tinggal rapat," jelas Sumadi.

Alhasil, ia pun tidak menyaksikan proses penyegelan ruang yang dulu ditempati Haryadi Suyuti tersebut. Sama halnya dengan informasi seputar berkas-berkas, serta siapa saja yang dibawa oleh lembaga



TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN

SEGEL - Kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta yang ruangnya turut disegel, Kamis (2/6).

antirasuah tersebut.

"Iya, setuju saya begitu (disegel). Terus saya tinggal. Saya kan ada rapat, jadi pindah ke ruang rapat sampai sore. Lalu, setelah itu saya pulang dan tidak ada komunikasi dengan yang bersangkutan (Haryadi Suyuti)," tandasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko berujar, pihaknya memperoleh informasi, bahwa ruang-ruang yang disegel selain ruang kerja wali kota meliputi Dinas Perizinan dan Penanaman Modal dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. "Memang ruangnya sudah tersegel, lalu ruang-ruang itu, saya dapat kabarnya seperti itu tadi (kemarin)," urainya.

Berdasarkan kabar yang diterimanya, KPK sejatinya sudah melakukan pantauan dari kisaran satu bulan yang lalu. Tapi, mengenai kasus apa yang masuk radar penegak hukum itu, dirinya mengaku tidak tahu. Termasuk, siapa saja yang diboyong KPK, khususnya dari pihak eksekutif.

"Saya tidak bisa memastikan, karena beliau (Haryadi Suyuti) juga tidak di kantor posisinya. Tapi, yang tadi di-nganu, kan, dari eksekutif," ucapnya.

"Lha, kantornya sampai disegel, berarti kan ada sesuatu yang dicurigai, *wong* ruangnya sampai disegel. Eksekutif kan, semoga teman-teman (legislatif) tidak terlibat," pungkas politikus PDI Perjuangan itu.

Pada 22 Oktober 2021, yang bersangkutan sempat melangsungkan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pencapaian MCP (Monitoring Center for Prevention) bersama KPK. Dalam kesempatan itu, ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar meningkatkan upaya terkait pencegahan korupsi.

Dari nilai yang dicapai tahun 2021, Haryadi pun berharap semua OPD di Pemkot Yogyakarta terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja dengan aksinya. Sehingga, Kota Pelajar mampu menjadi daerah yang turut terlibat aktif, dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

"Saya berharap kita terus meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring evaluasi yang dilakukan, agar Kota Yogyakarta mendapatkan hasil yang maksimal dan transparan dalam peningkatan MCP tahun depan," ujar Haryadi, yang kala itu masih menjabat wali kota. (**hda/aka/kpc**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas PUPKP 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Amat Segera	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 14 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005